

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PADAT KARYA
SURABAYA DIKECAMATAN TENGGILIS MEJOYO**

Mira Nita Giani,

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
miranitagiani01@gmail.com;

Arif Darmawan,

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
arif@untag-sby.ac.id;

Yusuf Hariyoko,

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
yusufhari@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Program Padat Karya Surabaya merupakan salah satu program Pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan melakukan pengelolaan terhadap aset milik pemerintah. Program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau keluarga miskin di Kota Surabaya. Pembangunan lokasi padat karya selanjutnya disebut dengan Rumah Padat Karya Maka untuk mencapai tujuan program pembangunan ini perlunya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam program. Dalam pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo masih yaitu Rumah Padat Karya Prapen terdapat kendala dan tujuan program belum tercapai. Untuk itu mengetahui mengapa pelaksanaan program belum mencapai tujuan perlu mengetahui partisipasi masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo masih rendah dikarenakan dalam pelaksanaan padat karya ini masih banyak kendala dan pendapatannya sangat rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat ini menyebabkan tujuan program padat karya untuk mengentaskan keluarga miskin belum dapat tercapai.

Kata kunci: *Kemiskinan, Padat Karya, Partisipasi Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang harus segera diatasi dimana untuk mengentaskan merupakan tujuan Negara Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat bahwa adanya Negara Indonesia ialah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memicu masalah lainnya seperti meningkatnya kriminalitas, pendidikan yang buruk, permasalahan kesehatan dan lain sebagainya. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dilihat dari segi ekonomi didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan dan non pangan yang diukur dari segi pengeluaran. Pepatah mengatakan bahwa negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin (Nugroho, 2003). Pengurangan angka kemiskinan sendiri menjaditujuan institusi – institusi dalam suatu negara, institusi nasional, politikus, dan pihak lainnya. Sehingga telah menjadi *urgensi* Pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan guna pengentasan kemiskinan. Permasalahan seperti ini banyak terjadi di kota–kota besar yang ada di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi di Surabaya, Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia. Angka kemiskinan yang ada di Kota Surabaya ini masih terbilang tinggi.

Tabel: Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Surabaya pada tahun 2014-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	474 365	530 178	567 474	592 137	611 466
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	154.71	140.81	130.55	145.67	152.49
Presentase Penduduk Miskin	5.39	4.88	4.51	5.02	5.23

Sumber: *Badan Pusat Statistik Indonesia*

Menurut Kartasmita (Roidah, 2016), menyebutkan kebijakan penanggulangan kemiskinan mencakup tiga arah kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan tidak langsung dimana bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menjamin kelangsungan berbagai upaya pengentasan kemiskinan; yang kedua adalah kebijakan langsung yang menasar kelompok berpenghasilan rendah, ketiga ialah kebijakan guna penyiapan masyarakat miskin dan aparat yang bertanggungjawab terhadap kelancaran program sekaligus penggerak dan perluasan upaya penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya Sri Mulyani (Soetrisno, 1995) menjelaskan suatu kebijakan yang dapat mengatasi kemiskinan sekaligus mempertahankan pertumbuhan, menjelaskan bahwa, membuka kemungkinan bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan itu sendiri. Dengan demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan dengan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan sangatlah diperlukan. Dalam partisipasi ini, perlu upaya pemerintah untuk mampu meningkatkan atau mengembangkan potensi atau daya yang adadalam masyarakat

dalam program pembangunan yang ada. Salah satu kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di Kota Surabaya ialah Program Padat Karya Surabaya.

Program Padat Karya ini dilakukan melalui pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Surabaya untuk membuka lapangan pekerjaan dengan sasaran tenaga kerja dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau keluarga miskin. Lokasi usaha ini nantinya akan disebut dengan “Rumah Padat Karya”, jenis usaha dalam rumah padat karya ini tergantung pada potensi yang dapat dikembangkan di masing-masing daerah dan keinginan masyarakat setempat. Walikota Surabaya menargetkan besaran yang diperoleh pelaku usaha ini mencapai Rp. 2.000.000,-/orang dalam satu bulan.

Pelaksanaan program padat karya ini tersebar di 31 kecamatan yang ada di Kota Surabaya. Namun dalam pelaksanaan program ini masih banyak yang belum optimal salah satunya ialah Rumah Padat Karya Prapen yang bergerak dalam usaha laundy, jahit dan permak. pada program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo ini partisipasi masyarakat sebagai tenaga kerja terus mengalami penurunan hingga hanya menyisakan 11 pekerja.

Selain itu, perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah tidaklah maksimal dapat dilihat dari usaha laundy yang ada. Pada usaha laundry di Rumah Padat Karya Prapen mengalokasikan 29 buah mesin cuci namun tidak mengalokasikan mesin pengering sehingga usaha ini menjadi tidak efisien. Untuk itu, penting menganalisis partisipasi masyarakat dalam program padat karya dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Program Padat Karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan proses perubahan ke tingkat yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup. Sejalan dengan prespektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi dari Rostow, dan strukturalisasi serta modernisasi menjelaskan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan. Dalam pembangunan sendiri istilah tiga pilar pembangunan berkelanjutan *sustainable development*.

Tiga pilar ini diantaranya pembangunan sosial, pembangunan perekonomian, dan pembangunan lingkungan hidup. Menurut Schumpeter dalam (Suryana, 2000) menjelaskan bahwa Pembangunan Ekonomi atau *Economic Development* merupakan perubahan pada lapangan industry dan perdagangan yang memiliki kaitan dengan pendapatan per kapitan dan pendapatan nasional.

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan proses pemerintah dengan masyarakatnya dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya dengan membangun kolaborasi pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat.

Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu permasalahan global yang menjadi tantangan bagi tiap negara untuk mampu mengatasinya. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang memiliki pendapatan yang rendah dari sisi ekonomi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok baik sandang, papan, maupun pangan dalam kehidupan sehari-hari. Secara konseptual, Theodorson menyatakan kemiskinan atau *poverty* ialah “ A how standard of living that lasts long enough to undermine the health, morale and self aspects of an individual or group of individual” (Tantoro, 2014). Menurut (Tjondronegoro, 1996), miskin dalam artian absolut diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarga baik berupa pangan maupun non pangan. Sedangkan kemiskinan absolut menurut World Bank yaitu ketidakmampuan suatu individu memenuhi kebutuhan dasarnya (Dillon & Hermanto, 1993).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memiliki makna yang luas dari beberapa ahli atau tokoh. Partisipasi dapat diartikan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka (Mikkelsen, 1999). Menurut (Dwiningrum, 2011), partisipasi merupakan dukungan melalui keterlibatan dalam bentuk tenaga baik emosi dan mental guna mendorong dan mengembangkan sesuatu agar semua tujuan dapat tercapai baik saat pengawasan maupun pengelolaan.

Partisipasi masyarakat dalam suatu program pemerintah, menitikberatkan pada pembangunan yang ada. Dengan adanya partisipasi dalam pembangunan akan menentukan keberhasilan program. Partisipasi ini akan menumbuhkan komitmen dalam menyukseskan program, meningkatkan keahlian dan ketrampilan masyarakat.

Menurut Keith Davis dalam (Sastropetro, 1988) ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu pikiran (*psychological participation*), tenaga (*physical participation*), pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*), uang (*money participation*), keahlian (*participation with skill*), dan barang (*material participation*).

Dalam pembangunan terdapat 4(empat) lingkup partisipasi yaitu partisipasi menurut Yadav dalam (Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2019) yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu partisipasi masyarakat dalam melalui forum yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dalam tahap ini masyarakat dapat menyalurkan atau menyumbangkan ide atau saran mengenai program. Melalui partisipasi ini program pembangunan dapat mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat luas.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu partisipasi melalui pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga. Dalam partisipasi pelaksanaan kegiatan ini perlu untuk mengorganisir masyarakat guna memelihara hasil-hasil

pembangunan agar manfaatnya dapat dinikmati terus menerus tanpa penurunan kualitasnya dalam jangka panjang.

3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi yaitu partisipasi guna memperoleh umpan balik tentang masalah atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan sendiri melalui keterlibatan masyarakat. Partisipasi dapat dengan mengumpulkan informasi mengenai perkembangan pembangunan.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi ini akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian dari pemerintah karena beranggapan bahwa manfaat akan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Namun seringkali masyarakat tidak dapat memahami manfaat dalam program pembangunan sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi sia-sia.

Adapun tingkatan partisipasi menurut Arnstein dalam (Muluk, 2007) mengemukakan teori mengenai jenjang partisipasi atau derajat partisipasi yang dikenal sebagai *ladder of participation* (tangga partisipasi) yang memuat 8 anak tangga.



Gambar 1. Tangga Partisipasi oleh Sherry Arnstein
Sumber : (Muluk, 2007)

1. Derajat Kuasa Warga.
Derajat tertinggi ialah kuasa warga dimana masyarakat memiliki peluang besar dalam pembuatan kebijakan. Terdapat tiga anak tangga yaitu kemitraan yang menunjukkan adanya timbal balik yang dinegosiasikan, kuasa yang didelegasikan menunjukkan bahwa masyarakat diberi kuasa dari sebagian atau seluruh kebijakan, dan kendali warga menunjukkan kebijakan sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat.
2. Derajat Partisipasi.
Pada derajat partisipasi atau *citizen participation* menunjukkan atau masyarakat ikut berpartisipasi. Anak tangga pemberian informasi menunjukkan adanya sosialisasi ataupun komunikasi. Konsultasi menunjukkan adanya komunikasi dua arah. Selanjutnya Penentraman menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan namun pemerintahlah yang

memegang kuasa untuk mengambil keputusan.

3. Derajat Nonpartisipasi

Derajat nonpartisipasi menunjukkan adanya distorsi partisipasi dimana pemegang kuasa tidak menginginkan adanya partisipasi masyarakat namun sekedar menyenangkan partisipan. Terdapat dua anak tangga yaitu manipulasi yang berarti adanya permainan yang dilakukan pemerintah dan terapi yang bertujuan agar masyarakat tidak berontak atau marah dengan kebijakan yang ada.

Padat Karya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan 2 (dua) definisi padat karya sebagai (1) Pekerjaan yang berasaskan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia (dalam jumlah yang besar), dan (2) Kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan modal atau mesin. Padat karya ini mengutamakan pekerjaan dengan sumber daya manusia dalam jumlah yang besar dengan tujuan permasalahan pengangguran ataupun kemiskinan dapat berkurang. (MercyCorps, 2007) menjelaskan bahwa Padat Karya atau *Cash for Work* adalah intervensi dalam jangka pendek yang digunakan oleh organisasi kemanusiaan untuk menyediakan pekerjaan sementara dalam proyek atau kegiatan public seperti memperbaiki jalan, membersihkan puing-puing, membangun infrastruktur ke segmen populasi yang paling rentan.

Padat karya merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan *marginal*, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian “Partisipasi masyarakat dalam program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo” ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Saryono, 2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Adapun lokasi penelitian ini ialah Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Penelitian ini menggunakan sumber data primer juga sumber data sekunder. Dalam pengumpulan data sendiri dengan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

D. PEMBAHASAN

Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Menurut Yadaf dalam (Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2019), partisipasi dalam pengambilan keputusan menitikberatkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam forum yang memungkinkan pengambilan keputusan tentang program program pembangunan di wilayah setempat.

Hal ini sesuai dalam implementasi program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, partisipasi dalam pengambilan keputusan ini misalnya mengenai penentuan jenis usaha dalam pembangunan padat karya didasarkan pada

banyaknya jenis intervensi yang diinginkan masyarakat dimana dilakukan melalui mekanisme pendataan.

Dalam padat karya di Tenggilis Mejoyo terdapat jenis usaha jahit dan laundry atau penatu. Selain itu, melalui forum bersama masyarakat dapat memberikan ide atau saran (partisipasi pikiran) terkait lokasi pembangunan Rumah Padat Karya.

Masyarakat dapat memberikan aspirasi kepada pemerintah namun pemerintahlah yang membuat keputusan. Pengambilan keputusan ini tidak bisa diserahkan kepada masyarakat karena pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal untuk lokasi pembangunan yang tepat ataupun mengenai legal standing tersebut.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada program padat karya ini sudah sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 1 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bentuk peran warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, perlu lebih banyak dilakukan sosialisasi atau forum pengambilan keputusan dengan masyarakat atau calon pekerja.

Dalam program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo ini masih kurang adanya sosialisasi atau forum bersama dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang kurang paham mengenai program padat karya ini. Kurangnya komunikasi publik ini menyebabkan tidak tersampainya arah kebijakan yang menentukan tujuan program tercapai.

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan pembangunan menurut Yadaf dalam (Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2019), bentuk partisipasi masyarakat dilakukan dengan kesukarelaannya dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, pikiran, dan bentuk korbanan lainnya dimana ini sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing masing warga yang bersangkutan. Sejalan dengan program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk tenaga dan juga pikiran (*psychological and physical participation*) namun tingkatannya masih tergolong rendah.

Partisipasi masyarakat masih rendah terbukti dengan tenaga kerja di Rumah Padat Karya saat ini jumlahnya sedikit. Pada awal terbentuknya Padat Karya Prapen jumlah pekerja menurut drastis hingga saat ini menyisakan 10% dari jumlah awal. Ini dikarenakan terdapat kesalahpahaman pada masyarakat yang beranggapan bahwa setelah pelatihan maka mereka akan diberikan mesin untuk pribadi padahal pada program padat karya merupakan program Pemerintah Kota Surabaya dengan memanfaatkan aset milik Pemkot oleh masyarakat untuk kegiatan usaha bersama. Selain itu, kurangnya kesukarelaan masyarakat untuk membantu mengurus manajemen Rumah Padat Karya Prapen.

Saat ini hanya terdapat pengurus yang membantu padat karya pada usaha laundry sedangkan pada padat karya jahit belum ada pengurus sendiri. Partisipasi masyarakat yang rendah ini menunjukkan bahwa program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo belum maksimal dalam mencapai tujuannya karena hanya menysasar sedikit dari jumlah keluarga miskin. Ini senada dengan pendapat

(Nuah, 2016) bahwa partisipasi merupakan wujud kemauan masyarakat akan program pemerintah dimana kemauan tersebut diwujudkan dengan mendukung program melalui partisipasi aktif sehingga partisipasi masyarakat ini difungsikan sebagai factor penentu keberhasilan program.

Guna meningkatkan partisipasi pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan memberikan motivasi. Selain itu, perlunya pemerintah untuk meningkatkan perannyapada pemasaran usaha. Pemasaran usaha yang luas akan meningkatkan banyaknya order guna meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang tinggi tentunya akan merangsang keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program padat karya karena mendapat benefit yang tinggi.

Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Pada program pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat biasanya dilakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi (MONEV) partisipatif. Keikutsertaan masyarakat pada tahap monitoring dan evaluasi ini menitikberatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan namun sebagai pelaku pembangunan. Dalam pemantauan dan evaluasi pada program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo sendiri, masyarakat sebagai pekerja maupun pengurus dilibatkan dalam prosesnya karena masyarakat disini sebagai subjek dan objek pembangunan.

Ini sejalan dengan pendapat (Chambers, 1992)dimana pelaku atau aktor dalam pembangunan perlu dilibatkan dalam proses pembangunan secara keseluruhan mulai dari identifikasi kebutuhan serta analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi. Yadaf dalam (Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2019) menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta bagaimana perilaku aparat pembangunan. Sehingga untuk menemukan informasi ini masyarakat harus bersifat kritis. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yadaf.

Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan kegiatan ini masyarakat sebagai pekerja atau pengurus selalu memonitoring kegiatan mereka tiap harinya dengan mencatat pengeluaran bahan baku, mencatat order, pengecekan terhadap alat dan mesin. Kegiatan monitoring harian ini dilakukan oleh pekerja juga pengurus padat karya.

Selanjutnya hasil monitoring ini tiap bulannya akan disampaikan kepada pihak pemerintah kecamatan. Hasil monitoring juga langsung ditindaklanjuti oleh pekerja dan apabila tidak bisa menanganinya sendiri pekerja akan meminta bantuan atau saran kepada pemerintah kecamatan.

Selain itu, pekerja padat karya juga mengikuti kegiatan evaluasi yang dilaksanakan bersama dinas terkait. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, monitoring kegiatan sudah dilakukan dengan baik dan rutin. Namun, perlunya pemerintah untuk meningkatkan frekuensi kegiatan evaluasi yang dilakukan bersama masyarakat. Kegiatan evaluasi pemerintah bersama masyarakat selama pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo baru dilaksanakan satu kali selama berjalannya program.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti menarik kesimpulan mengenai partisipasi masyarakat dalam program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

1. Dalam pengambilan keputusan program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, masyarakat ikutserta dalam pengambilan keputusan dengan memberikan saran atau ide/gagasan. Partisipasi ini dilihat dari pemilihan lokasi pembangunan penentuan jenis usaha dalam Rumah Padat Karya Prapen.
2. Pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo ini melibatkan masyarakat sebagai pengurus dan tenaga kerja. Namun partisipasi masyarakat saat ini sangat rendah, pada awal terbentuk hingga sekarang selalu mengalami penurunan tenaga kerja. Penurunan partisipasi masyarakat ini disebabkan karena masyarakat beranggapan bahwa program padat karya ini merupakan program bantuan usaha sehingga mesin akan diberikan kepada masyarakat dan kecilnya gaji atau upah yang diterima tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Dalam pemantauan dan evaluasi program padat karya sendiri masyarakat juga terlibat. Masyarakat melakukan pemantauan terhadap pekerjaan mereka setiap harinya meliputi pendapatan dan pengeluaran usaha serta melakukan pengecekan mesin yang disampaikan pada pihak pemerintah satu bulan sekali. Masyarakat juga ikutserta dalam kegiatan evaluasi yang diadakan pemerintah kecamatan dan dinas terkait.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan pemerintah memberikan sosialisasi mengenai program sehingga memberikan pemahaman, kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
2. Meningkatkan peran pemerintah dalam melakukan pemasaran usaha dengan berkolaborasi antar sektor publik maupun sektor privat.
3. Perlu melakukan pembangunan Rumah Padat Karya Prapen sehingga lokasi dapat merepresentasikan lokasi usaha sebagaimana umumnya yang dapat menarik perhatian masyarakat umum sehingga meningkatkan jumlah order/pesanan.
4. Mengadakan kegiatan pelatihan berkala agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam bidang usahanya

REFERENSI

- Chambers, R. (1992). *Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory*.
Dillon, & Hermanto. (1993). *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Konseptual dan Global*. Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Vol. 22 cm*. Pustaka

Pelajar.

- Mardikanto, T., & Poerwoko Soebianto. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- MercyCorps. (2007). *Guide to Cash for Work Programming*.
- Mikkelsen, B. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya - Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Muluk, M. R. K. (2007). *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah*. Bayumedia Publishing.
- Nuah, V. Y. (2016). Peran Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Politico*.
- Nugroho, D. R. (2003). *Reiventing Pembangunan, Menata ulang paradigma pembangunan untuk membangun Indonesia Baru dengan keunggulan global*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Roidah, I. S. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, 39–55.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sastropoetro, S. RA. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Pembangunan Nasional*.
- Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat.
- Tantoro, S. (2014). *Pembasmian Kemiskinan Perspektif Sosiologi-Antropologi* (Zulkarnaini, Ed.). Pustaka Pelajar.